



Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra

Banyak Pejabat Pensiun, Hindari Menumpuknya Plt

Tahun ini sejumlah pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Jogja memasuki masa pensiun. Banyaknya kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang purna tugas bakal berlanjut pada 2026 mendatang. Kondisi itu harus secepatnya diantisipasi.



DOCUMENTASI PIRAS

Sekaligus implementasi dari visi misi Hasta Jogja Mulia dengan pengisian pejabat yang kompeten."

DWI CANDRA PUTRA

"JANGAN sampai beberapa jabatan yang kosong itu diisi pelaksana tugas atau Plt," ingat Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra kemarin (10/3).

Candra, sapaan akrabnya, mendesak agar banyak jabatan eselon dua yang kosong diisi Plt diminimalkan. Alasannya bila Plt sampai menumpuk bakal menjadi preseden yang kurang baik. "Plt itu sebenarnya juga bisa dibaca sebagai pejabat latihan," kelakar kader Partai NasDem ini.

Mengutip UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

mengamanatkan kepala daerah terpilih dan sudah dilantik bisa mengangkat pejabat struktural di lingkungannya 6 bulan setelah pelantikan kecuali mendapatkan izin menteri dalam negeri (Mendagri). Regulasi tersebut perlu mendapatkan atensi khusus.

Sebab, sejak beberapa waktu lalu sejumlah jabatan strategis di pemkot lowong. Sebut saja kepala dinas lingkungan hidup (DLH). Sejak 1 Februari 2025 kosong karena Kepala DLH Sugeng Darmanto



HINDARI KEKOSONGAN: Pelantikan pejabat eselon dua yang berlangsung di lingkungan Pemkot Jogja beberapa waktu lalu. Ada beberapa jabatan kosong yang perlu segera diisi.

pensiun. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dedi Budiono digeser menjadi asisten administrasi umum.

Posisi kepala BKPSDM dirangkap Dedi dengan status Plt. Kekosongan jabatan juga terjadi pada Sekwan DPRD Kota Jogja. Sama seperti Sugeng, Sekwan Basuki Hari Saksono memasuki purna tugas sejak 1 Desember 2024.

Menyikapi itu, wakil rakyat dua periode ini

berharap Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo secepatnya melakukan pemetaan terhadap berbagai jabatan yang kosong. Itu perlu dilakukan sebagai upaya akselerasi pelayanan masyarakat yang prima.

"Sekaligus implementasi dari visi misi Hasta Jogja Mulia dengan pengisian pejabat yang kompeten," pinta alumnus Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta ini.

Mengantisipasi banyak jabatan yang kosong menjadi sisi penting. Sebab, itu sering menimbulkan kendala dalam pengambilan keputusan dan akselerasi program. Candra sengaja menyinggung soal itu karena posisi kepala BKPSDM maupun kepala DLH tidak boleh terlalu lama diisi Plt. Dua jabatan itu bersinggungan erat dengan visi misi dan konsentrasi Hasto. "Meningkatkan SDM masyarakat maupun ASN

di pemerintahan serta penanganan masalah sampah," tegasnya.

Di luar itu, lanjut dia, Sekda Kota Jogja Aman Yuradijaya pada 1 Januari 2026 juga memasuki purna tugas. Sama seperti sejumlah jabatan kepala OPD, bakal pensiunnya Sekda juga harus menjadi perhatian. "Jangan sampai nanti juga diisi Plt dalam kurun waktu tertentu," tandas Candra.

Jabatan Sekda dalam struktur pemerintah daerah cukup strategis. Ketika dijabat Plt, ada beberapa kendala yang tidak bisa dihindari. Misalnya dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Sebab, secara *ex officio* atau otomatis, Sekda juga menjabat ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) serta ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).

Bila sudah dilakukan pemetaan dan persiapan sedari sekarang, kekosongan jabatan struktural eselon dua dengan penunjukan Plt dapat dihindari. Dengan demikian, akselerasi program visi misi wali kota dapat secepatnya direalisasikan. (inu/kus/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005